RENCANA
KERJA TAHUN 2023

DEPUTI BIDANG
PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (Deputi Bidang PMK) BKN Tahun 2023 merupakan gambaran program kerja Deputi Bidang PMK dalam 1 (satu) tahun mendatang yang dijabarkan dari Rencana Strategis Deputi Bidang PMK BKN 2020 2024.

Dokumen Renja Deputi Bidang PMK 2023 memuat sasaran, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BKN.

Rencana kerja program dan kegiatan pada Renja Deputi Bidang PMK 2023 menjadi dokumen utama untuk merumuskan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2023, yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang PMK di tahun 2023.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa Memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah kita rencanakan. Aamiin.

Jakarta, Desember 2022

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN

Ditandatangani Secara Elektronik
Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum.
NIP. 196509141992031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 4
DAFTAR GAMBAR 6
BAB I PENDAHULUAN 7
A. LATAR BELAKANG 7
B. LANDASAN HUKUM 8
C. KONDISI UMUM 9
D. RUANG LINGKUP 9
E. MAKSUD DAN TUJUAN 10
BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2022 11
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2022 11
B. EVALUASI AKIP DEPUTI BIDANG PMK 23
BAB III RENCANA KERJA 2023 24
A. KEBIJAKAN NASIONAL 2023 24
B. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BKN 2023 25
C. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA 2023 27
D. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023 32
BAB IV PENUTUP 43
LAMPIRAN 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Persentase Instansi yang Melakukan Pengukuran IP ASN..... 11
Tabel 2.2 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat 13
Tabel 2.3 Realisasi Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen 14
Tabel 2.4 Realisasi Jumlah Instansi Menyusun Rencana Pengembangan Karir..... 15
Tabel 2.5 Realisasi Persentase Instansi Menerapkan Kebijakan Kompensasi 17
Tabel 2.6 Realisasi Persentase Instansi Menerapkan Kebijakan Kinerja 18
Tabel 2.7 Realisasi Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 18
Tabel 2.8 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BKN..... 19
Tabel 2.9 Realisasi Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Terstandar 20
Tabel 2.10 Realisasi Nilai Pelaksanaan RB 20
Tabel 2.11 Realisasi Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 21
Tabel 2.12 Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BKN 21
Tabel 2.13 Realisasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK/Inspektorat 22
Tabel 3.1 Target Persentase Instansi yang Melakukan Pengukuran IP ASN..... 32
Tabel 3.2 Target Reform IKU 1 33
Tabel 3.3 Target Indeks Kepuasan Masyarakat 33
Tabel 3.4 Target Reform IKU 2 34
Tabel 3.5 Target Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen 34
Tabel 3.6 Target Reform IKU 3 35
Tabel 3.7 Target Jumlah Instansi Menyusun Rencana Pengembangan Karir..... 36
Tabel 3.8 Target Persentase Instansi Menerapkan Kebijakan Kompensasi 37
Tabel 3.9 Target Persentase Instansi Menerapkan Kebijakan Kinerja 37
Tabel 3.10 Target Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi..... 38
Tabel 3.11 Target Indeks Profesionalitas ASN BKN 39
Tabel 3.12 Target Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Terstandar..... 39
Tabel 3.13 Target Nilai Pelaksanaan RB 40

Tabel 3.14 Target Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 41

Tabel 3.15 Target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BKN 41

Tabel 3.16 Target Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit BPK/Inspektorat 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Strategi Target Kinerja 32

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN, Deputi Bidang PMK memiliki peran strategis yang dijabarkan melalui misi sebagai "Pembina Penyelenggaraan Manajemen ASN dan Penyelenggara Manajemen ASN". Peran strategis tersebut menuntut kapasitas dan kapabilitas yang optimal dari unit-unit organisasi pelaksana tugas dan fungsi teknis di lingkungan Deputi Bidang PMK dalam melaksanakan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023. Sementara itu, sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, isu dan permasalahan tahun 2023 yang dihadapi Deputi Bidang PMK, diantaranya adalah:

a. Isu Penguatan Implementasi Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit
   Kegiatan prioritas nasional tersebut diturunkan ke dalam proyek prioritas nasional yaitu Manajemen Talenta Nasional ASN Berbasis Sistem Merit. Dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek prioritas nasional, Deputi Bidang PMK memiliki tugas dalam pelaksanaan program prioritas nasional di BKN yaitu Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja ASN Terintegrasi pada K/L/D;
b. Isu Kebijakan Manajemen Kesejahteraan ASN
   Dalam rangka perumusan dan pembahasan RPP Manajemen Kesejahteraan ASN, Deputi Bidang PMK diharapkan berperan secara aktif memberikan kontribusi manfaat berdasarkan kewenangan BKN. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh Deputi Bidang PMK adalah melakukan simulasi data perhitungan komponen gaji dan penghasilan lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan RPP Manajemen Kesejahteraan; dan
c. Isu lainnya terkait perumusan kebijakan teknis dan pembinaan manajemen ASN sebagaimana akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023.

Untuk mewujudkan peran strategis Deputi Bidang PMK maka perlu didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang konsisten dan akuntabel. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Deputi Bidang PMK Tahun 2023.

Dokumen Renja ini mengacu pada Keputusan Deputi Bidang PMK Nomor 105/KEP/PMK/IV/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang PMK Tahun 2020-2024. Hal lain yang melatarbelakangi penyusunan dokumen Renja ini adalah pentingnya proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Sehingga pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat dilakukan secara bertahap dalam periode tahunan. Selain itu, hasil pengukuran dan evaluasi kinerja dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
11. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara 2020−2024;
12. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023;

13. Rencana Strategis Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020–2024.

C. KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pembinaan Kinerja, Jabatan Karier, Kompensasi Pegawai Negeri Sipil, dan Jabatan Fungsional yang menjadi Kewenangan BKN dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;
c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

D. RUANG LINGKUP

Rencana Kerja Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

1. Arah kebijakan dan Strategi Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;
2. Program Prioritas Nasional Tahun 2023;

3. Rencana Kerja Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Tahun 2023

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Renja Deputi Bidang PMK Tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi unit kerja yang berada di lingkungan Deputi Bidang PMK. Dengan adanya dokumen Renja ini, diharapkan bahwa proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam periode satu tahun. Kemudian hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja dapat ditindaklanjuti dengan membandingkan target kinerja yang tertuang dalam dokumen Renja Deputi Bidang PMK 2023.

BAB II
EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2022

IKU 1. Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesional ASN

SS	IKU	Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	
SS.1	IKU 1	85%	90%	100%	100 %	85,94%	92,49%	92.49%

Tabel 2.1 Realisasi Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesional ASN

Indikator ini bertujuan mengukur secara kuantitatif jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan pengukuran indeks profesional pegawai ASN sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Berdasarkan peraturan tersebut Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas setiap tahunnya. Sedangkan tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dalam Pedoman tersebut, Badan Kepegawaian Negara melaporkan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan membuat aplikasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat diakses pada alamat website *https://ip-jasn.bkn.go.id*.

Pada tabel 2.1 di atas, target capaian pada tahun 2021 yang semula tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang PMK sebesar 89%

mengalami perubahan menjadi 90%. Sedangkan target capaian pada tahun 2022 yang semula sebesar 92% mengalami perubahan menjadi 100%. Perubahan dan penyesuaian target tersebut disebabkan karena adanya percepatan realisasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 85,94% dan tahun 2021 sebesar 92,49%.

Berdasarkan data realisasi tahun 2020 sampai dengan 2021, partisipasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan. Partisipasi instansi pada tahun 2020 sebesar 86% atau sejumlah 538 dari 626 instansi dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 92,49% atau 579 dari 626 instansi. Dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2021 telah mendekati target capaian indikator 2024 yaitu 100%.

Faktor keberhasilan pencapaian IKU ini adalah:

a. Melakukan koordinasi dengan pengelola Indeks Profesionalitas ASN terkait penyelesaian kendala yang dihadapi instansi di wilayah kerja masing-masing;
b. Melakukan koordinasi dengan pengelola Indeks Profesionalitas ASN Instansi Pemerintah yang belum memilik user aplikasi Indeks Profesionalitas ASN;
c. Memberikan fasilitasi berupa Bimbingan Teknis dan Pendampingan pengukuran IP ASN bagi Instansi Pemerintah secara daring dan luring;
d. Memberikan fasilitasi rekonsiliasi data diklat/kursus pada Dimensi Kompetensi bagi Instansi Pemerintah yang masih rendah pemutakhiran data diklat/kursus di SAPK; dan
e. Membuat grup telegram dan whatsapp pengelola Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional dan Instansi Pusat.

Pada Periode 2023, rencana tindak lanjut IKU ini adalah:

a. Pemberian informasi secara intensif mengenai pemenuhan nilai per dimensi di setiap instansi pemerintah agar data segera dimutakhirkan ke dalam SAPK/SIASN;
b. Koordinasi intensif dengan Kantor Regional BKN terkait informasi terupdate pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Instansi daerah; dan
c. Koordinasi intensif dengan pengelola Indeks Profesionalitas ASN terkait informasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Instansi Pusat.

IKU 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN

SS	IKU	Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	
SS.2	IKU 2	85	88	91	95	87,8	88,65	93,31%

Tabel 2.2 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen yang diselenggarakan BKN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atau *stakeholder* terhadap pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan BKN khususnya oleh Deputi bidang PMK. Pengukuran indeks ini dilakukan dengan melakukan survei kepada *stakeholder* yang menerima pelayanan kepegawaian dari direktorat-direktorat yang berada dibawah Deputi Bidang PMK berupa layanan konsultasi pada Pelayanan Kepegawaian Terpadu (PKT) BKN, sosialisasi, serta bimbingan teknis dan fasilitasi. Berikut adalah nilai Indeks Kepuasan Instansi per direktorat.

Bila dilihat pada tabel di atas, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Deputi bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian telah memenuhi target dan mengalami peningkatan. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN pada tahun 2021 sebesar 88.65, mengalami kenaikan indeks sebesar 0,65 poin dari realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 88.

Faktor keberhasilan pencapaian IKU ini adalah:

a. Melakukan rapat evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Deputi bidang PMK;
b. Dalam pengumpulan data, selain menggunakan link survei kepuasan yang terpusat, namun juga menggunakan link tersendiri untuk kegiatan workshop, FGD, formulir survei untuk PTSP dan untuk survei kepuasan internal.

Pada Periode 2023, rencana tindak lanjut IKU ini adalah:

a. Menindaklanjuti saran ataupun masukan membangun yang dapat meningkatkan hasil survey pada kegiatan-kegiatan selanjutnya;
b. Setiap kegiatan yang difasilitasi oleh Deputi bidang PMK terselenggara sesuai dengan rencana yang telah dijadwalkan;
c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan.

IKU 3. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN

SS	IKU	Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	
SS.3	IKU 3	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%

Tabel 2.3 Realisasi Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN

Indikator ini menggambarkan pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN yang ditetapkan dan diundangkan. Regulasi teknis merupakan peraturan teknis yang merupakan pelaksanaan amanat dari peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya. Regulasi teknis ini berupa Peraturan BKN. Sedangkan Instrumen merupakan alat yang dapat digunakan sebagai panduan atau acuan terkait manajemen ASN. Instrumen ini diantaranya Keputusan Kepala BKN dan Surat Edaran. Indikator ini bertujuan memberikan pedoman terhadap hal-hal yang bersifat teknis sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya serta merupakan bentuk kewenangan BKN dalam mengatur kebijakan teknis terkait manajemen ASN.

Bila dilihat pada tabel 2.3 di atas, realisasi Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN yang diselenggarakan Deputi bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian dapat selalu memenuhi target pada

tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 100%. Konsistensi capaian target 100% ini diharapkan dapat bertahan hingga akhir periode Renstra pada tahun 2024.

Faktor keberhasilan pencapaian IKU ini adalah optimalisasi komunikasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan peraturan dengan mitra kerja internal maupun eksternal (Unit Kerja terkait, Sekretariat Kabinet dan harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Sedangkan kendala dan tindak lanjut pencapaian target IKU ini adalah perlunya persetujuan Presiden pada saat peraturan BKN yang sudah ditetapkan perlu dimintakan persetujuan kepada presiden melalui Sekretariat Kabinet apabila berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis, dan lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga. Sehingga rencana tindak lanjut pada tahun 2023, Untuk mengantisipasi pengundangan peraturan BKN yang memerlukan waktu lama maka pada saat harmonisasi rancangan peraturan BKN pihak Sekretariat Kabinet turut dilibatkan dalam pembahasan.

IKU 4. Jumlah Instansi Pemerintah yang Menyusun Rencana Pengembangan Karier PNS

SS	IKU	Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	
SS.4	IKU 4	20	137	137	137	20	137	100%

Tabel 2.4 Realisasi Jumlah Instansi Pemerintah yang Menyusun Rencana Pengembangan Karier PNS

Indikator ini menggambarkan ketersediaan dokumen laporan Instansi Pemerintah dalam proses persiapan penyusunan rencana pengembangan karir serta berkomitmen untuk menindaklanjuti penyusunan rencana pengembangan karier Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan BKN tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil. Dari tabel 2.4 di atas realisasi Jumlah Instansi Pemerintah yang menyusun rencana pengembangan karier PNS yang diselenggarakan Deputi bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian dapat selalu memenuhi target capaian setiap tahun yaitu 100%.

Terkait target capaian yang tertuang dalam dokumen Renstra Deputi Bidang PMK, pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah terjadi perubahan dan penyesuaian target. Pada tahun 2020 yang semula target capaian yang ditetapkan sejumlah 72 Instansi kemudian berubah menjadi 20. Penyesuaian target tersebut disebabkan karena berdampak adanya masalah COVID-19. Selanjutnya pada tahun 2021 sampai dengan 2024 juga terjadi penyesuaian target yang semula 72 menjadi 137. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa realisasi pada tahun 2021 telah melebihi target (terjadi percepatan target) sehingga perlu melakukan penyesuaian target hingga tahun 2024.

Faktor keberhasilan pencapaian IKU ini adalah:

a. Membuat *timeline* secara terukur dalam mengadakan workshop, bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi secara bertahap dan berkesinambungan;
b. Menyediakan berbagai media informasi penyusunan rencana pengembangan karier PNS melalui *website https://sunrenbangrirdjasn.wixsite.com/my-site*, *e- book*, serta video yang mudah diakses oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pada Periode 2023, rencana tindak lanjut IKU ini adalah:

a. Memberikan fasilitasi dan konsultasi yang lebih intensif lagi kepada instansi pemerintah terkait penyusunan rencana pengembangan karier;
b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan fasilitasi, sehingga permasalahan dan kendala yang dihadapi dapat segera ditindaklanjuti.

IKU 5. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Kompensasi (Pemberian Tunjangan Kinerja) berbasis pada Hasil Evaluasi Jabatan

SS	IKU	Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	
SS.5	IKU 5	40%	60%	70%	100 %	47,8%	65,38%	65,38%

Tabel 2.5 Realisasi Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Kompensasi (Pemberian Tunjangan Kinerja) berbasis pada Hasil Evaluasi Jabatan

Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Kompensasi diukur berdasarkan jumlah Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Kompensasi dibandingkan dengan Jumlah Instansi Pemerintah (82 Instansi Pusat dan 542 Instansi Daerah). Berdasarkan tabel 2.5 di atas realisasi capaian kinerja IKU pada tahun 2020 dan 2021 telah melampaui target yang ditetapkan. Namun bila realisasi tahun 2021 sebesar 65,38% yaitu sejumlah 408 instansi pemerintah, dibandingkan dengan target IKU tahun 2024, maka masih ada selisih sejumlah 216 instansi perintah yang harus tercapai untuk memenuhi target 100% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, maka mulai tahun 2023 akan dilakukan upaya antara lain diseminasi informasi, kegiatan coaching clinic, dan fasilitasi koordinasi/ asistensi di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah.

Selain itu, mulai tahun 2023 terjadi perubahan kebijakan terkait penerapan kebijakan kompensasi ASN dengan lingkup yang lebih luas lagi. Sehingga pada tahun 2023 dan 2024 penerapan kebijakan kompensasi tidak hanya terkait tunjangan kinerja, namun juga mencakup bidang kompensasi lainnya (gaji, fasilitas, pensiun, penghargaan dan perlindungan).

IKU 6. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Manajemen Kinerja ASN Berkriteria Baik

SS	IKU	Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	
SS.6	IKU 6	40%	55%	70%	100 %	75%	44%	44%

Tabel 2.6 Realisasi Persentase Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Manajemen Kinerja ASN Berkriteria Baik

Dari table 2.6 di atas dapat di cermati bahwa pada tahun 2021 target kinerja tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan karena adanya penerapan peraturan baru yaitu Permenpan RB Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja ASN pada pertengahan tahun, sehingga menyebabkan perlu adanya penyesuaian sistem manajemen kinerja ASN baru. Rentang waktu yang cukup pendek hingga akhir tahun untuk penyesuaian sistem tersebut, membuat capaian kinerja di tahun 2021 berada di bawah target yaitu 44% dari target 55%. Namun Deputi Bidang PMK akan terus melakukan upaya perbaikan melalui optimalisasi kegiatan sebagai berikut:

a. Kolaborasi dengan unit kerja lain terutama PPSI ASN dalam membangun sistem kinerja ASN; dan
b. Melaksanakan kegiatan *piloting* sistem kinerja ASN pada beberapa instansi yang dipilih.

IKU 7. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Deputi PMK

SS	IKU	Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	
SS.7	IKU 7	6	6	6 4	6	6	6	100%

Tabel 2.7 Realisasi Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Deputi PMK

IKU ini merupakan sarana untuk memonitor perkembangan atau progress dari kegiatan pada deputi PMK melalui pelaksanaan monitoring pada setiap

triwulan. Pada tahun tahun sebelumnya terdapat 6 Dokumen yaitu 4 dokumen triwulan dan 2 dokumen semester. Sedangkan Pada tahun 2022 ini progress dilaporkan setiap Triwulan saja karena monitor setiap semester merupakan rekap dari dua triwulan sebelumnya. Walaupun cuma empat (4) dokumen namun secara substansi seluruh progress kegiatan sudah tertuang dalam laporan dimaksud.

IKU 8. Indeks Profesionalitas ASN BKN Deputi Bidang PMK BKN

SS	IKU	Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	
SS.8	IKU 8	77	77	78	79	70,20	78,15	98.92%

Tabel 2.8 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BKN Deputi Bidang PMK BKN

Pada tahun 2022, BKN melalui Biro Sumber Daya Manusia telah menyampaikan Nota Dinas Nomor 353/NK.04.01/SD/A.II/2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Mandiri Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan BKN. Berdasarkan laporan tersebut, Deputi Bidang PMK memperoleh rata-rata nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 79,96 (kategori SEDANG). Capaian nilai Indeks yang diperoleh ini berada di bawah target yang ditetapkan yaitu 80. Nilai Indeks Profesional ASN tidak tercapai target sebagian besar disebabkan beberapa diklat atau pelatihan peningkatan kompetensi belum dilaporkan. Diharapkan kedepan program peningkatan kompetensi dari pegawai pada Deputi PMK akan di administrasi dengan lebih baik sehingga dapat mendukung peningkatan Indeks Profesional ASN.

IKU 9. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar

SS	IKU	Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	
SS.9	IKU 9	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%

Tabel 2.9 Realisasi Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar

Indikator ini menggambarkan pemanfaatan sistem informasi terstandar yang disediakan oleh BKN untuk pengelolaan internal di Kedeputian PMK. Sistem informasi minimal yang digunakan terdiri dari *Location Based Presence* (LBP), Presensi online, e-kinerja, *digital signature, e-travel,* SIAVA, SIMONBAJA, LPSE, dan SIONI. Dengan memanfaatkan sistem informasi yang terstandar, maka proses bisnis yang berlangsung guna menunjang pemenuhan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian menjadi efektif dan efisien.

IKU 10. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang PMK BKN

SS	IKU	Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	
SS. 10	IKU 10	32	33	34	36	34,94	32,28	89,67%

Tabel 2.10 Realisasi Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang PMK BKN

Indeks yang menunjukkan kumulatif nilai di area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2021, capaian indikator ini telah mencapai sebesar 89.67%. Adanya *gap* antara capaian dengan target yang telah ditentukan, menunjukkan perlu dilakukan upaya peningkatan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang PMK BKN pada tahun 2022 - 2023, agar dapat mencapai target renstra tahun 2024. Kolaborasi dan koordinasi yang intensif dengan Tim Reformasi Birokrasi BKN diharapkan dapat meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang PMK.

IKU 11. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Deputi Bidang PMK BKN

SS	IKU	Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	
SS. 10	IKU 11	75	76	77	79	60,64	64,46	81.59%

Tabel 2.11 Realisasi Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Indikator ini menunjukkan nilai hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Deputi Bidang PMK BKN menggambarkan nilai akuntabilitas mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Adanya *gap* pada capaian renstra hingga tahun 2021, menjadi masukan bagi Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian untuk melakukan upaya perbaikan, yakni dengan menindaklanjuti rekomendasi LHE Inspektorat.

IKU 12. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BKN Deputi Bidang PMK

SS	IKU	Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	
SS. 11	IKU 12	87%	90%	93%	100 %	96,8%	98,15%	98,15%

Tabel 2.12 Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BKN

Realisasi pada indikator ini menggambarkan seberapa besar serapan baik anggaran maupun fisik yang ada di Deputi Bidang PMK. Semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi penggunaan anggaran. Dibandingkan dengan target pada tahun 2024, capaian renstra hingga tahun 2021 menunjukkan perbedaan yang sedikit yakni sebesar 1.85%. Guna mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran di tahun 2021, sehingga dapat dilakukan perencanaan anggaran dan fisik yang lebih baik, serta pelaksanaan sesuai dengan rencana. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan anggaran BKN Deputi Bidang PMK dapat meningkat.

IKU 13. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit BPK/Inspektorat di Lingkup Deputi Bidang PMK

SS	IKU	Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	
SS. 11	IKU 13	100 %	100%	100%	100 %	100&	100%	100%

Tabel 2.13 Realisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit BPK/Inspektorat di Lingkup Deputi Bidang PMK

Selama tahun 2020-2021, Deputi Bidang PMK tidak ada temuan BPK yang harus ditindaklanjuti atau dikonfirmasi terhadap pengelolaan keuangan pada 4 (empat) direktorat di bawah Deputi Bidang PMK. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan pengelolaan anggaran mematuhi prinsip-prinsip penganggaran yang baik, serta sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Hal tersebut tidak terlepas dari kolaborasi yang baik di antara pengelola keuangan di lingkup Deputi Bidang PMK, baik Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dengan pegawai terkait pada Biro Keuangan BKN.

B. EVALUASI AKIP DEPUTI BIDANG PMK

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2021 telah dievaluasi oleh Inspektorat dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2022 Nomor 072/AI.03/LHE/H/2022 dengan memperoleh Nilai sebesar 70,60 (kategori Sangat Baik). Namun demikian, nilai AKIP Deputi Bidang PMK masih berada di bawah nilai target capaian yaitu 76. Catatan rekomendasi Inspektorat terkait komponen Perencanaan Kinerja yaitu Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja melalui:

1. Memformalkan dokumen perencanaan kinerja;
2. Menyelaraskan kinerja dengan dokumen perencanaan diatasnya, dan dilakukan reviu berkala atas dokumen perencanaan untuk meyakinkan bahwa dokumen perencanaan masih relevan dengan kondisi yang ada atau perlu dilakukan revisi untuk hasil yang lebih baik, dan hasil reviu/analisis untuk didokumentasikan atau dijelaskan dalam dokumen perencanaan;
3. Melakukan analisis yang memadai terkait ketidaktercapaian kinerja yang diperjanjikan, serta tindak lanjut perbaikannya dalam rangka penyempurnaan penyusunan perencanaan kinerja tahun yang akan datang;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi atas target kinerja secara berkala/periodik, untuk dapat segera diketahui apabila terdapat permasalahan terkait ketidaksesuaian capaian kinerja dengan target yang direncanakan, sebagai dasar pimpinan melakukan pengarahan dan pengorganisasian kegiatan untuk pencapaian target;
5. Untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dalam rangka kegiatan perencanaan mulai dari penyusunan sampai dengan monitoring dan evaluasi tindak lanjutnya.

BAB III
RENCANA KERJA 2023

A. KEBIJAKAN NASIONAL 2023

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Target vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (*herd immunity*) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pasca pandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Adapun arah kebijakan nasional tahun 2023 yaitu:

1. Fokus Kebijakan Makro 2023
    a. Peningkatan Produktivitas;
    b. Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif;
    c. Pembangunan yang Berkelanjutan;
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
3. Stabilitas Eksternal

4. Arah Kebijakan Fiskal
    a. Pendapatan Negara dan Hibah;
    b. Belanja Negara;
    c. Defisit dan Pembiayaan Anggaran;
5. Stabilitas Moneter
6. Stabilitas Sistem Keuangan
7. Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan
    a. Tingkat Pengangguran Terbuka;
    b. Tingkat Kemiskinan;
    c. Rasio Gini;
    d. Indeks Pembangunan Manusia;
    e. Ekonomi Hijau dan Rendah Karbo;
    f. Nilai Tukar Nelayan;
    g. Pemerataan Pembangunan;

BKN sebagai Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian sesuai dengan kebijakan rencana kegiatan pemerintah tahun 2023 mendukung fokus kebijakan makro dalam hal peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat *trajectory* tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (*within sectors*) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*).

Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Hal ini ditunjukkan dengan program prioritas nasional BKN yang mendukung pembangunan IKN. Selaras dengan peningkatan produktivitas BKN tersebut, Deputi Bidang PMK juga melaksanakan salah satu program prioritas nasional BKN yaitu melalui Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja ASN Terintegrasi pada K/L/D.

B. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BKN 2023

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Surat Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-617/MK.02/2022 B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, terdapat 5 (lima) program prioritas nasional BKN. Dari 5 (lima) program tersebut, terdapat 1 (satu) program yang diusulkan oleh Deputi Bidang PMK melalui Direktorat Kinerja ASN dan disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu program Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja ASN Terintegrasi pada K/L/D.

Direktorat Kinerja ASN pada tahun 2023 akan melaksanakan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja ASN Terintegrasi pada K/L/D berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Program ini dibutuhkan untuk segera dilakukan karena penerapan manajemen kinerja yang ada saat ini belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masing-masing Instansi Pemerintah memiliki sistem informasi kinerja yang bersifat mandiri dan karena itu sistem informasi kinerja ASN di setiap Instansi Pemerintah belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, masing-masing instansi belum memiliki sistem informasi kinerja yang terintegrasi dengan *database* nasional BKN. Hal ini menyebabkan kualitas data kinerja belum optimal. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi manajemen kinerja ASN yang terintegrasi pada seluruh Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data kinerja. Indikator yang diukur pada program ini adalah jumlah instansi yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi.

Tujuan percepatan penerapan sistem informasi manajemen kinerja pada seluruh Instansi Pusat dan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan perolehan data kinerja sebagai dasar penerapan manajemen talenta, sistem merit, dan pengisian indeks profesionalitas ASN;
2. Memudahkan Pengembangan karir ASN dan pengelolaan mutasi kepegawaian;

3. Memudahkan dalam pemantauan kinerja ASN dan pemberian kompensasi sebagai konsekuensi atas hasil kinerja ASN; dan
4. Mempercepat pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan terkait dengan pembinaan manajemen ASN.

Metode pelaksanaan yang digunakan untuk mencapai output tersebut terdiri atas kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Kegiatan utama tersebut adalah:

1. *Focus Group Discussion*;
2. Workshop;
3. Bimbingan Teknis;
4. Pendampingan; dan
5. Monitoring dan Evaluasi,

Sedangkan kegiatan penunjang yang dimaksud adalah:

1. *Coaching clinic* dengan materi Pengelolaan dan Sistem Informasi Kinerja ASN (daring dan luring); dan
2. Koordinasi dan konsultasi.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebanyak 411 (empat ratus sebelas) Instansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kinerja ASN Terintegrasi.

C. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA 2023

1. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi BKN, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada BKN dan penjabaran dari misi memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi BKN yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan manajemen ASN;
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN;

4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN; dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Peran Kedeputian bidang PMK sangat strategis jika dilihat dari fungsi BKN sesuai dengan amanat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu menjalankan fungsi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN. Hal tersebut kemudian telah ditetapkan dalam tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Kedeputian bidang PMK sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Deputi bidang PMK adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pembinaan manajemen kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, dan berdasarkan misi BKN tahun 2020-2024, maka Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian memberikan kontribusi untuk mewujudkan pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui peran pembinaan yang fokus pada pilar pertama dan kedua yaitu "Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN" dan "Penyelenggaraan Manajemen ASN" dengan visi dan misi sebagai berikut:

- **Visi:**

  Visi Deputi Bidang PMK selaras dengan visi BKN tahun 2020 – 2024 yaitu: "Mewujudkan pengelola ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

- **Misi**

  Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan misi Deputi Bidang PMK yaitu meningkatkan kualitas ASN melalui:

  1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN; dan
  2. Penyelenggaraan manajemen ASN.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Deputi Bidang PMK tahun 2020-2024, ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas sebagai referensi penyelenggaraan manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan pengelolaan ASN yang baik, meliputi:

➢ Pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja, disiplin, pengembangan karir dan pola karir);
➢ Kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); dan
➢ Kesejahteraan PNS (Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian, Tabungan Hari Tua/THT dan Perlindungan).

2. Mewujudkan penyelenggaraan manajemen ASN berkualitas prima sebagai implementasi sistem merit. Tercapainya tujuan ini diindikasikan dalam hal sebagai berikut:

➢ Berjalannya pengelolaan atau manajemen kepegawaian ASN yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kepegawaian di lingkungan Instansi Pusat maupun Instansi Daerah;
➢ Meningkatnya kinerja ASN sesuai tugas jabatan masing-masing yang mendukung pekerjaan, tugas pokok, dan fungsi unit kerjanya; dan
➢ Berjalannya sistem pengembangan karier dan pola karier ASN yang berdasarkan atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN

2. SASARAN RENCANA KERJA

Deputi Bidang PMK menentukan sasaran strategis yang akan dicapai untuk mewujudkan visi dan misi BKN sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Deputi Bidang PMK menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 empat perspektif, yakni *stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, yaitu sebagai berikut:

a. Sasaran strategis dari perspektif pemangku kepentingan (*Stakeholder Perspective*)

1) Sasaran strategis yang akan diwujudkan dari perspektif pemangku kepentingan adalah "Terwujudnya instansi pemerintah yang

profesional dalam menerapkan manajemen ASN" dengan indikator kinerja:

- ➢ Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

b. Sasaran strategis dari perspektif pengguna layanan (*customer perspective*)

2) Sasaran yang akan diwujudkan dari perspektif pemangku kepentingan adalah "Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima" dengan indikator kinerja:

- ➢ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan BKN

c. Sasaran strategis dari perspektif internal/proses bisnis (*internal perspective/business process*)

Sasaran strategis dari perspektif internal/proses bisnis yang akan diwujudkan adalah:

3) Sasaran strategis tiga yaitu "Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN" dengan indikator kinerja:

- ➢ Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN

4) Sasaran strategis empat yaitu"Tersusunnya rencana pengembangan karier PNS Instansi Pemerintah" dengan indikator kinerja:

- ➢ Jumlah Instansi Pemerintah yang menyusun Rencana Pengembangan Karier PNS

5) Sasaran strategis lima yaitu"Implementasi kebijakan manajemen kompensasi ASN pada Instansi Pemerintah" dengan indikator kinerja:

- ➢ Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan kebijakan kompensasi ASN

6) Sasaran strategis enam yaitu "Implementasi kebijakan manajemen kinerja ASN pada Instansi Pemerintah" dengan indikator kinerja:

- ➢ Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan kebijakan manajemen kinerja ASN berkriteria baik

7) Sasaran strategis tujuh yaitu "Terlaksananya monitoring dan evaluasi program Deputi Bidang PMK" dengan indikator kinerja:

- ➢ Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Deputi Bidang PMK

d. Sasaran strategis dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learn and growth perspective*)

Dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, sasaran strategis yang hendak diwujudkan adalah:

8) Sasaran strategis delapan yaitu "Terwujudnya ASN BKN yang profesional di lingkup Deputi Bidang PMK" dengan indikator kinerja:

➢ Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang PMK BKN

9) Sasaran strategis sembilan yaitu "Terwujudnya sistem informasi ASN yang handal dan mudah diakses" dengan indikator kinerja:

➢ Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar

10) Sasaran strategis sepuluh yaitu "Terwujudnya birokrasi di lingkup Deputi PMK BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan prima" dengan indikator kinerja:

➢ Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang PMK BKN

➢ Skor atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bidang PMK BKN

11) Sasaran strategis sebelas yaitu "Terkelolanya anggaran di lingkup Deputi Bidang PMK secara efisien
dan akuntabel" dengan indikator kinerja:

➢ Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Deputi Bidang PMK BKN

➢ Persentase tindak lanjut hasil audit BPK/ Inspektorat di lingkup Deputi Bidang PMK

Keempat sasaran strategis tersebut tergambar dalam peta strategi berikut ini.

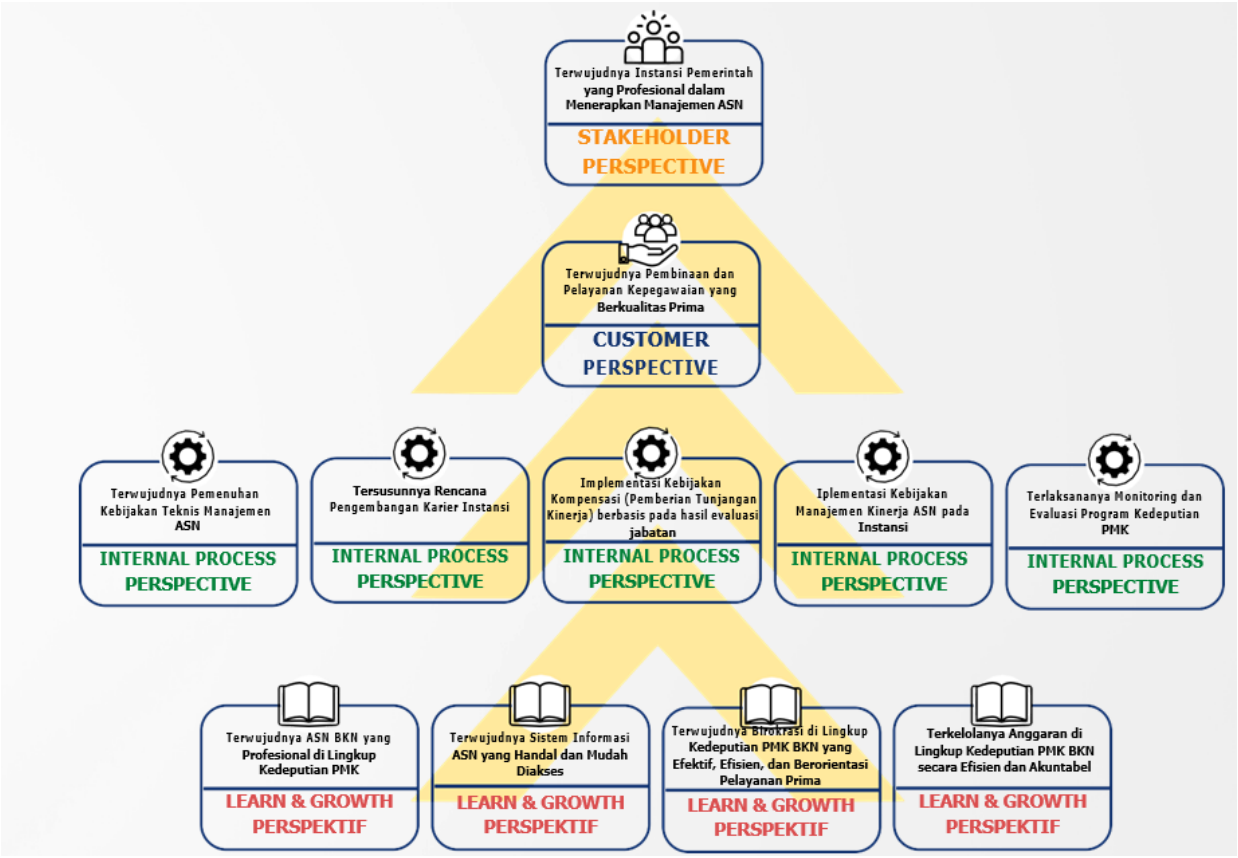

Gambar 1. Peta Strategi Target Kinerja Deputi Bidang PMK

D. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023

IKU 1. Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesional ASN

SS	IKU	Realisasi			Target 2023		Anggaran 2023
		2020	2021	2022	Renstra Deputi Bidang PMK	Renja	
SS.1	IKU 1	85,94%	92,49%	100%	96%	100%	375.225.000

Tabel 3.1 Target Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesional ASN

Terdapat perubahan target indikator pada dokumen Renstra Deputi Bidang PMK, dengan target pada Renja tahun 2023. Hal ini dikarenakan Deputi Bidang PMK, melalui kinerja Direktorat Jabatan ASN, dapat mendorong

instansi pemerintah untuk melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di tahun 2022. Tercapainya target 100% pada 2022 merupakan hal yang harus dipertahankan pada tahun 2023 dan tahun tahun berikutnya. Penggunaan Aplikasi merupakan faktor penting dalam mensukseskan pengukuran IP ASN. Seperti kita ketahui IP ASN merupakan representasi dari profesionalitas dari ASN dalam sebuah Instansi dan memberi kontribusi dalam meningkatkan *Brand Image* dari instansi pemerintahan.

No.	Reform/Inovasi
1	IP ASN yang terintegrasi dengan SIASN
2	Dashboard pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Instansi Pemerintah

Tabel 3.2 Target Reform IKU 1

Selain peningkatan target indikator, sebagai upaya percepatan realisasi, Deputi Bidang PMK juga melakukan inovasi yakni dengan mengintegrasikan Aplikasi IP ASN dengan SI ASN maka proses pengukuran IP ASN dapat dilakukan dengan lebih cepat dengan data yang up to date. Hal ini karena SI ASN juga didukung aplikasi pendukung lainnya yang memberikan data secara real time. Untuk mengakses data tersebut dikembangkan sebuah *dashboard* untuk mengakses informasi.

IKU 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN

SS	IKU	Realisasi			Target 2023		Anggaran 2023
		2020	2021	2022	Renstra Deputi Bidang PMK	Renja	
SS.2	IKU 2	87,8	88,65	91,29	93	93	-

Tabel 3.3 Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN

Dalam pencapaian realisasinya, indikator kedua ini tidak memerlukan anggaran. Hal ini dikarenakan pembinaan manajemen ASN yang

diselenggarakan, merupakan bentuk layanan publik, dan bagian dari tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK. Target pada indikator ini akan dicapai dengan strategi pelayanan *coaching clinic* yang nantinya akan dilakukan secara terintegrasi antar direktorat. Strategi ini sangat efektif karena instansi sekali datang bisa mendapatkan pembinaan terpadu sesuai dengan yang mereka butuhkan, bukan mentalitas silo pada setiap direktorat.

No.	Reform/Inovasi
1	Digitalisasi pembinaan manajemen kinerja melalui *Performance Mobile Learning*
2	Upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pemberian *coaching clinic* melalui website BKN dan surat ke Instansi

Tabel 3.4 Target Reform IKU 2

Pengembangan *Performance Mobile Learning* merupakan inovasi untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat melalui Gadget dari PNS. Performance mobile learning dikembangkan oleh direktorat kinerja dengan fitur fitur berupa *Frequently Asked Question* (FAQ), Video dan online chat. Nantinya akan ditunjuk petugas yang memonitor *chat* pada jam kerja dan di luar jam kerja akan ditangani oleh *chatbot*. Selain itu, sebagai upaya *reform* dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi, Deputi Bidang PMK memberikan pengumuman melalui website BKN dan surat ke instansi yang menjelaskan bahwa pelayanan publik yang diberikan tidak dipungut biaya, dan pegawai tidak menerima gratifikasi.

IKU 3. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN

SS	IKU	Realisasi			Target 2023		Anggaran 2023
		2020	2021	2022	Renstra Deputi Bidang PMK	Renja	
SS.3	IKU 3	100%	100%	113,30%	100%	100%	513.533.000

Tabel 3.5 Target Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN

Dengan mempertimbangkan ketercapaian target yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja ini sebelumnya mulai tahun 2020, 2021 hingga tahun 2022, maka Deputi Bidang PMK optimis untuk dapat mempertahankan pencapaian indikator ini tetap pada 100% hingga tahun 2024. Adapun kegiatan yang dilakukan mencakup

1. Penyusunan Rumusan Naskah Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN
2. Rapat Koordinasi Penyusunan Rumusan Naskah Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN
3. Rapat/Konsinyasi/Diseminasi/Uji Publik Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian
4. Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian

Meski terdapat perubahan tahapan dalam penerbitan regulasi, yakni perlu adanya persetujuan Presiden dalam penerbitan rancangan regulasi BKN. Dengan demikian, dalam proses harmonisasi, pertimbangan Sekretariat Kabinet dan Kemenkumham sangat berpengaruh dalam menentukan penyelesaian regulasi BKN. Di tahun 2023, Deputi Bidang PMK melakukan upaya inovasi, sebagai upaya untuk dapat memenuhi banyaknya kebutuhan akan regulasi teknis, yakni dengan:

No.	Reform/Inovasi
1	Digitalisasi Angka Kredit konvensional ke integrasi
2	Penerapan *Legal Need Analysis* (LNA) dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Tabel 3.6 Target Reform IKU 3

Salah satu kebutuhan regulasi teknis dan manajemen ASN yang mendesak ialah peraturan teknis dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, yang mencabut (baik seluruh maupun sebagian) 345 (tiga ratus empat puluh lima) peraturan. Oleh karenanya, upaya inovasi Digitalisasi Angka Kredit konvensional ke integrasi dilakukan guna menjawab kebutuhan

tersebut. Selain itu, *Legal Need Analysis* (LNA) juga diterapkan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, kebutuhan akan regulasi teknis dan instrumen di tahun depan telah diidentifikasi, dan terpetakan.

IKU 4. Jumlah Instansi Pemerintah yang Menyusun Rencana Pengembangan Karier PNS

SS	IKU	Realisasi			Target 2023		Anggaran 2023
		2020	2021	2022	Renstra Deputi Bidang PMK	Renja	
SS.4	IKU 4	20	137	137	72	20	251.480.000

Tabel 3.7 Target Jumlah Instansi Pemerintah yang Menyusun Rencana Pengembangan Karier PNS

Pada dokumen Renstra tahun 2020-2024, ditetapkan bahwa tiap tahunnya, sejumlah 72 (tujuh puluh dua) Instansi Pemerintah menyusun Rencana Pengembangan Karier PNS, sehingga total terdapat 360 instansi sampai tahun 2024. Target tersebut tidak dapat terpenuhi pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada terkendalanya proses pembinaan kepada instansi, untuk dapat menyusun rencana pengembangan karir PNS. Oleh karena itu, Deputi Bidang PMK melakukan upaya-upaya percepatan di yakni dengan meningkatkan target menjadi 137 (seratus tiga puluh tujuh) instansi yang menyusun Rencana Pengembangan Karier PNS pada tahun 2021 dan 2022.

Dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2022 masih terpaut 66 (enam puluh enam) instansi. Dengan mempertimbangkan tingginya realisasi di tahun 2021 dan 2022, maka dilakukan penyesuaian target indikator, yakni yang mulanya 72 (tujuh puluh dua) instansi menjadi 20 (dua puluh) instansi di tahun 2023.

IKU 5. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Kompensasi ASN

SS	IKU	Realisasi			Target 2023		Anggaran 2023
		2020	2021	2022	Renstra Deputi Bidang PMK	Renja	
SS.5	IKU 5	47,8%	65,38%	79%	85%	85%	-

Tabel 3.8 Target Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Kompensasi ASN

Pelaksanaan indikator ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya penerapan Kebijakan Kompensasi ASN oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan kebijakan kompensasi yang diukur meliputi kebijakan gaji, fasilitas, Sistem Pemberian Tunjangan Kinerja /TPP berdasarkan Kelas Jabatan dan Harga Jabatan, penerapan kebijakan pensiun, perlindungan dan penghargaan berdasarkan Kebijakan Teknis yang berlaku. Pada tahun 2023, terjadi perubahan kebijakan terkait penerapan kebijakan kompensasi ASN dengan lingkup yang lebih luas lagi. Sehingga pada tahun 2023 dan 2024 penerapan kebijakan kompensasi tidak hanya terkait Tunjangan Kinerja, namun juga mencakup bidang kompensasi lainnya (gaji, fasilitas, pensiun, penghargaan dan perlindungan). Untuk mencapai target pada tahun 2024 upaya yang akan dilakukan antara lain diseminasi informasi, kegiatan coaching clinic, dan fasilitasi koordinasi/ asistensi di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah.

IKU 6. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Manajemen Kinerja ASN Berkriteria Baik

SS	IKU	Realisasi			Target 2023		Anggaran 2023
		2020	2021	2022	Renstra Deputi Bidang PMK	Renja	
SS.6	IKU 6	75%	44%	73%	85%	85%	185.000.000

Tabel 3.9 Target Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Manajemen Kinerja ASN Berkriteria Baik

Pada Tahun 2022, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan aturan terkait dengan Kinerja yaitu Permenpan No. 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN. Terkait dengan aturan tersebut, maka pengukuran dari Instansi yang telah menerapkan Manajemen Kinerja bernilai Baik didasarkan pada aturan tersebut. Proses pembinaan dilakukan dalam bentuk evaluasi menggunakan instrumen yang tervalidasi, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan lanjutan untuk mendapatkan peningkatan penilaian dengan minimal kriteria akhir adalah Baik.

Pelaksanaan indikator ini akan dilaksanakan secara simultan, dengan kegiatan Program Prioritas Nasional yang dilakukan Direktorat Kinerja ASN. Adapun pengukuran penerapan manajemen kinerja ASN direncanakan terhadap 411 (empat ratus sebelas) instansi, dan akan selesai pada triwulan 2 (dua). Dengan mengetahui kategori instansi dalam menerapkan Kebijakan Manajemen Kinerja ASN, maka dapat menjadi bahan pembinaan selanjutnya.

IKU 7. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Deputi PMK

SS	IKU	Realisasi			Target 2023		Anggaran 2023
		2020	2021	2022	Renstra Deputi Bidang PMK	Renja	
SS.7	IKU 7	6	6	4	6	4	

Tabel 3.10 Target Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Deputi PMK

Adanya perubahan target pada Renstra tahun 2020-2024, dan Renja tahun 2023, dikarenakan terdapat perubahan dokumen monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan. Pada tahun 2020-2021, dokumen terdiri dari

1. Dokumen Evaluasi Program;
2. Dokumen Evaluasi Rencana Aksi;
3. Dokumen Pemantauan Rencana Aksi;
4. Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Program;
5. Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Rencana Aksi; dan
6. Dokumen Evaluasi dan Monitoring Renstra.

Sementara sejak tahun 2022, dokumen monev berasal dari laporan monitoring dan evaluasi masing-masing direktorat, mencakup 1. Direktorat Kinerja ASN, 2. Direktorat Peraturan Perundang-undangan, 3. Direktorat Kompensasi ASN, 4. Direktorat Jabatan ASN.

IKU 8. Indeks Profesionalitas ASN BKN Deputi Bidang PMK BKN

SS	IKU	Realisasi			Target 2023		Anggaran 2023
		2020	2021	2022	Renstra Deputi Bidang PMK	Renja	
SS.8	IKU 8	70,20	78,15	79,96	78	80	-

Tabel 3.11 Target Indeks Profesionalitas ASN BKN Deputi Bidang PMK BKN

Indikator 8 merupakan salah satu indikator dengan perubahan target. Hal ini dikarenakan target pada Renstra tahun 2020-2024 yakni nilai Indeks profesionalitas BKN Deputi Bidang PMK sebesar 78, telah dapat dicapai pada tahun 2022. Dengan asas peningkatan, maka di tahun 2023, target indikator ini diubah menjadi 80. Untuk mencapai hal tersebut maka upaya upaya peningkatan disiplin, peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja akan dilakukan dengan berbagai strategi. Selain itu updating data kompetensi akan dilakukan sesegera mungkin sesudah pegawai memperoleh pengembangan kompetensi.

IKU 9. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar

SS	IKU	Realisasi			Target 2023		Anggaran 2023
		2020	2021	2022	Renstra Deputi Bidang PMK	Renja	
SS.9	IKU 9	100%	100%	100%	100%	100%	-

Tabel 3.12 Target Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar

Sistem informasi terstandar merupakan aplikasi yang wajib digunakan oleh seluruh unit pada Badan Kepegawaian Negara. Deputi Bidang PMK beserta

direktorat direktorat di dalamnya juga berkomitmen untuk menggunakan aplikasi aplikasi yang sudah ditetapkan oleh BKN. Untuk optimalisasi penggunaan aplikasi dimaksud maka setiap ada perubahan atau updating aplikasi, maka pegawai di lingkungan deputi PMK sesuai dengan perannya atau tanggung jawabnya dipastikan akan mengikuti pelatihan atau peningkatan skill dalam penggunaan aplikasi. Dengan demikian diharapkan semua aplikasi yang sudah distandarkan dapat terimplementasi dengan baik.

IKU 10. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang PMK BKN

SS	IKU	Realisasi			Target 2023		Anggaran 2023
		2020	2021	2022	Renstra Deputi Bidang PMK	Renja	
SS.10	IKU 10	34,94	32,28	30,23	35	35	

Tabel 3.13 Target Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang PMK BKN

Untuk mencapai target nilai pada IKU 10 ini yaitu 35 akan dilakukan mempelajari rekomendasi dari Tim PAN RB yang telah melakukan penilaian pada tahun 2022. Dari rekomendasi itu maka kinerja dari Tim RB Deputi akan diarahkan agar melakukan perbaikan perbaikan. Selain itu Tim Rb Deputi akan terus berkomunikasi dengan Tim RB Instansi dan melakukan monitoring kinerja secara berkala. Selain itu juga penerapan manajemen bukti dengan lebih efektif pada setiap kegiatan yang dilakukan.

IKU 11. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Deputi Bidang PMK BKN

SS	IKU	Realisasi			Target 2023		Anggaran 2023
		2020	2021	2022	Renstra Deputi Bidang PMK	Renja	
SS.10	IKU 11	60,64	64,46	70,60	78	78	

Tabel 3.14 Target Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Deputi Bidang PMK BKN

Pada tahun 2022 capaian nilai AKIP adalah 70 sedangkan target skor evaluasi AKIP pada tahun 2023 sebesar 78. Untuk mencapai peningkatan skor dimaksud akan dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi tahun 2022. selain itu akan dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Pengelompokan informasi terkait dengan kinerja
2. Pelaksanaan validasi sumber informasi kinerja
3. Metode Pengumpulan informasi kinerja
4. Waktu dan frekuensi pengumpulan kinerja yang terjadwal
5. Ketepatan analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja (analisis hubungan sebab akibat yang terkait dengan capaian)
6. Penyusunan perencanaan Kinerja yang baik.

IKU 12. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BKN Deputi Bidang PMK

SS	IKU	Realisasi			Target 2023		Anggaran 2023
		2020	2021	2022	Renstra Deputi Bidang PMK	Renja	
SS.11	IKU 12	96,8%	98,15%	98,57 %	96%	96.25%	-

Tabel 3.15 Target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BKN Deputi Bidang PMK

Target pelaksanaan anggaran pada IKU 12 ini akan dilaksanakan dengan beberapa rencana aksi ataupun target antara. Rencana aksi maupun target antara dimaksud akan dimonitor secara ketat pelaksanaannya sehingga pada

akhir tahun pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana dapat dicapai. Adanya perubahan target pada Renja tahun 2023, menunjukkan bahwa realisasi indikator ini tergolong baik. Berdasarkan realisasi tahun 2020-2022, terlihat adanya peningkatan, sehingga Deputi Bidang PMK optimis untuk menaikkan target Kualitas Pelaksanaan Anggaran BKN Deputi Bidang PMK dari 96% menjadi 96.25%.

IKU 13. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit BPK/Inspektorat di Lingkup Deputi Bidang PMK

SS	IKU	Realisasi			Target 2023		Anggaran 2023
		2020	2021	2022	Renstra Deputi Bidang PMK	Renja	
SS.11	IKU 13	100%	100%	100%	100%	100%	-

Tabel 3.16 Target Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit BPK/Inspektorat di Lingkup Deputi Bidang PMK

Pada IKU 13 ini, Deputi Bidang PMK akan menindaklanjuti apabila ada temuan dari BPK baik yang sifatnya mayor maupun minor dan akan mengkonfirmasi semua hal yang perlu dijelaskan ke BPK sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Meski realisasi tahun 2020-2022 telah mencapai target pada renstra, tetapi Deputi Bidang PMK tetap melakukan pembenahan, agar dapat mempertahankan pencapaian indikator ini.

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Renja Deputi Bidang PMK Tahun 2023 menggambarkan target kinerja dan anggaran kumulatif program teknis dari seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang PMK. Renja Deputi Bidang PMK Tahun 2023 ini akan menjadi dokumen utama untuk menetapkan perjanjian kinerja unit kerja di lingkungan Deputi Bidang PMK tahun 2023. Dengan demikian, dokumen Renja Deputi Bidang PMK Tahun 2023 juga menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan bidang teknis pembinaan manajemen kepegawaian di tahun anggaran 2023.

Demikian dokumen Renja Deputi Bidang PMK Tahun 2023 ini disusun, sebagai bagian dari proses untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BKN.

LAMPIRAN

1. Renstra K/L pada Aplikasi Krisna Bappenas;
2. Renja K/L Tahun 2023 pada Aplikasi Krisna Bappenas;
3. Rencana Target IKU 2023;
4. Halaman III DIPA/RPD 2023.

REKAP 1: K/L

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENSTRA K/L)

TAHUN 2020 - 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2. VISI : Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

3. MISI :
1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
2. Penyelenggaraan manajemen ASN
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

4. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
01	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN					
01.01	Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai NSPK	5	20	40	60	100
01.02	Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	85	90	100	100	100
02	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima					
02.01	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN	85	86	87	88	95
02.02	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan BKN	85	86	87	88	95
03	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN					
03.01	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN	100	100	100	100	100
04	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN					
04.01	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN	85	90	95	100	100
05	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN					
05.01	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital	75	80	85	90	95
06	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN					
06.01	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti	30	65	85	95	100
07	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel					
07.01	Indeks Profesionalitas ASN BKN	77	77	78	78	80
07.02	Indeks Maturitas SPBE BKN	3	3,2	3,5	3,7	4

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
07.03	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	80	81	82	83	85
07.04	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	75	77	79	81	85
07.05	Opini atas Laporan Keuangan BKN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

5. PROGRAM, SASARAN PROGRAM, DAN DUKUNGAN SASARAN STRATEGIS

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM	SASARAN STRATEGIS
088.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	
CO.01	Terselenggaranya tata kelola manajemen ASN yang sesuai NSPK di instansi Pemerintah	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN
CO.02	Terselenggaranya Pembinaaan dan Pelayanan Manajemen ASN	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima
CO.03	Terselenggaranya Kebijakan Teknis Manajemen ASN	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN
CO.04	Meningkatnya Digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan Manajemen ASN	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN
CO.05	Meningkatnya Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN
CO.06	Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN
088.WA	Program Dukungan Manajemen	
WA.01	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Internal BKN	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
088.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	215.708.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.712.450,0	0,0	0,0	0,0	223.421.425,0
088.WA	Program Dukungan Manajemen	523.101.478,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523.101.478,0
Total		738.810.453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.712.450,0	0,0	0,0	0,0	746.522.903,0

7. PRAKIRAAN KEBUTUHAN

KODE	PROGRAM	TOTAL INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020	PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
			2021	2022	2023	2024
088.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	223.421.425,0	2.353.697.573,0	5.488.360.259,0	5.928.648.654,0	6.396.147.244,0
088.WA	Program Dukungan Manajemen	523.101.478,0	582.178.308,0	599.297.967,0	613.784.244,0	626.211.981,0
Total		746.522.903,0	2.935.875.881,0	6.087.658.226,0	6.542.432.898,0	7.022.359.225,0

Jakarta, 13 Februari 2023

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2. PROGRAM : CO - Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN

3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terselenggaranya tata kelola manajemen ASN yang sesuai NSPK di instansi Pemerintah
02 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Kepegawaian
03 - Terselenggaranya Kebijakan Teknis Manajemen ASN
04 - Meningkatnya Digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan Manajemen ASN
05 - Meningkatnya Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN
06 - Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN

4. KEGIATAN : 4845 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 07 - Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara
29 - Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara
21 - Pusat Perencaaan Kebutuhan ASN
09 - Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara
08 - Direktorat Peraturan Perundang-undangan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Tersusunnya rumusan kebijakan teknis manajemen ASN		6.002.742,0
01.01	Persentase rumusan kebijakan teknis manajemen ASN yang ditetapkan	100	
02	Terwujudnya pembinaan manajemen ASN		2.822.258,0
02.01	Tingkat efektifitas pembinaan manajemen ASN	81	
Total			8.825.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	*Tersusunnya rumusan kebijakan teknis manajemen ASN*										6.002.742,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.AAH	Peraturan lainnya										825.000,0
01.AAH.001	Peraturan di Bidang Kepegawaian								000 - Bukan Tematik		825.000,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										16.875,0
		Pusat	Pusat								16.875,0
	052 - Pelaksanaan										321.100,0
		Pusat	Pusat								321.100,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										487.025,0
		Pusat	Pusat								487.025,0
01.ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur										931.927,0
01.ABQ.001	Rekomendasi Kebijakan Gaji, Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan ASN								000 - Bukan Tematik		299.295,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										11.250,0
		Pusat	Pusat								11.250,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
	052 - Pelaksanaan										288.045,0
		Pusat	Pusat								288.045,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
01.ABQ.002	Rekomendasi Kebijakan Tunjangan, Fasilitas dan Evaluasi Jabatan								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
	052 - Pelaksanaan										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
01.ABQ.004	Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan ASN								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										14.000,0
		Pusat	Pusat								14.000,0
	052 - Pelaksanaan										139.770,0
		Pusat	Pusat								139.770,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										46.230,0
		Pusat	Pusat								46.230,0
01.ABQ.005	Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN								000 - Bukan Tematik		68.250,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
	052 - Pelaksanaan										2.625,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								2.625,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										65.625,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								65.625,0
01.ABQ.006	Rekomendasi Perencanaan Kebutuhan ASN								000 - Bukan Tematik		85.935,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										5.250,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								5.250,0
	052 - Pelaksanaan										75.435,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								75.435,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										5.250,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								5.250,0
01.ABQ.007	Kebijakan Bidang Aparatur								000 - Bukan Tematik		278.447,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										15.000,0
		Pusat	Pusat								15.000,0
	052 - Pelaksanaan										263.447,0
		Pusat	Pusat								263.447,0
	053 - Monev dan Pelaporan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										173.295,0
01.AFA.001	Standar Teknis Jabatan								000 - Bukan Tematik		173.295,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan dan Persiapan										4.500,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								4.500,0
	052 - Pelaksanaan										164.295,0
		Pusat	Pusat								70.083,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								94.212,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										4.500,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								4.500,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										1.072.520,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Atas Nilai Indeks Profesionalitas ASN								000 - Bukan Tematik		375.225,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										4.500,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								4.500,0
	052 - Pelaksanaan										164.225,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								164.225,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										206.500,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								206.500,0
01.BDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Kebutuhan ASN								000 - Bukan Tematik		445.815,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										2.625,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								2.625,0
	052 - Pelaksanaan										437.940,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								437.940,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										5.250,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								5.250,0
01.BDB.004	Pembinaan di Bidang Kebijakan Kompensasi ASN								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
	052 - Pelaksanaan										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
	053 - Monev/Pelaporan										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
01.BDB.005	Penyusunan Rencana Pengembangan Karir Instansi Pemerintah								000 - Bukan Tematik		251.480,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										16.250,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								16.250,0
	052 - Pelaksanaan										13.395,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								13.395,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										221.835,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								221.835,0
01.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										3.000.000,0
01.QDB.003	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di Seluruh K/L/D				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Transformasi Manajemen SDM Aparatur	Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan	000 - Bukan Tematik		3.000.000,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										551.792,0
		Pusat	Pusat								551.792,0
	052 - Pelaksanaan										1.869.989,0
		Pusat	Pusat								1.869.989,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										578.219,0
		Pusat	Pusat								578.219,0
02	*Terwujudnya pembinaan manajemen ASN*										2.822.258,0
02.AEA	Koordinasi										2.450.000,0
02.AEA.001	Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian								000 - Bukan Tematik		2.450.000,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										109.750,0
		Pusat	Pusat								109.750,0
	052 - Pelaksanaan										2.340.250,0
		Pusat	Pusat								2.340.250,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								0,0
02.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										372.258,0
02.BDB.003	Pembinaan Manajemen Kepegawaian di bidang Kompensasi								000 - Bukan Tematik		372.258,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										3.750,0
		Pusat	Pusat								3.750,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
	052 - Pelaksanaan										368.508,0
		Pusat	Pusat								368.508,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
Total											8.825.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Tersusunnya rumusan kebijakan teknis manajemen ASN				6.002.742,0				10.582.333,0	12.049.302,1	13.874.754,1
01.AAH	Peraturan lainnya		peraturan/ Rancangan Peraturan/ Surat Keputusan		825.000,0				1.054.000,0	1.255.000,0	1.360.000,0
01.AAH.001	Peraturan di Bidang Kepegawaian	15	peraturan		825.000,0	15	15	15	1.054.000,0	1.255.000,0	1.360.000,0
01.AAH.001.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	16.875,0	16.875,0	1,0	1,0	1,0	24.000,0	25.000,0	30.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.AAH.001.052	Pelaksanaan	15,0	Peraturan	21.406,7	321.100,0	15,0	15,0	15,0	1.000.000,0	1.200.000,0	1.300.000,0
01.AAH.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	Layanan	487.025,0	487.025,0	1,0	1,0	1,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0
01.ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		931.927,0				1.881.000,0	2.025.500,0	2.171.450,1
01.ABQ.001	Rekomendasi Kebijakan Gaji, Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan ASN	3	Rekomendasi Kebijakan		299.295,0	6	6	6	420.000,0	450.000,0	470.000,0
01.ABQ.001.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	11.250,0	11.250,0	1,0	1,0	1,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
01.ABQ.001.052	Pelaksanaan	6,0	Rekomendasi Kebijakan	48.007,5	288.045,0	6,0	6,0	6,0	400.000,0	430.000,0	450.000,0
01.ABQ.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	Layanan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
01.ABQ.002	Rekomendasi Kebijakan Tunjangan, Fasilitas dan Evaluasi Jabatan	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABQ.002.051	Perencanaan dan Persiapan	0,0	Layanan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABQ.002.052	Pelaksanaan	0,0	Rekomendasi Kebijakan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABQ.002.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	0,0	Layanan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABQ.004	Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan ASN	1	Rekomendasi Kebijakan		200.000,0	1	1	1	216.000,0	226.000,0	237.000,0
01.ABQ.004.051	Perencanaan dan Persiapan	0,0	Layanan	Infinity	14.000,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0	22.000,0	23.000,0
01.ABQ.004.052	Pelaksanaan	0,0	Rekomendasi Kebijakan	Infinity	139.770,0	0,0	0,0	0,0	174.000,0	182.000,0	191.000,0
01.ABQ.004.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	0,0	Layanan	Infinity	46.230,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0	22.000,0	23.000,0
01.ABQ.005	Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN	1	Rekomendasi Kebijakan		68.250,0	1	1	1	165.000,0	181.500,0	199.650,1
01.ABQ.005.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABQ.005.052	Pelaksanaan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	2.625,0	2.625,0	1,0	1,0	0,0	5.775,0	6.352,5	6.987,8
01.ABQ.005.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	0,0	Layanan	Infinity	65.625,0	0,0	0,0	0,0	159.225,0	175.147,5	192.662,3
01.ABQ.006	Rekomendasi Perencanaan Kebutuhan ASN	1	Rekomendasi Kebijakan		85.935,0	1	1	1	880.000,0	968.000,0	1.064.800,0
01.ABQ.006.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	5.250,0	5.250,0	1,0	1,0	0,0	11.550,0	12.705,0	13.975,5
01.ABQ.006.052	Pelaksanaan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	75.435,0	75.435,0	1,0	1,0	0,0	856.900,0	942.590,0	1.036.849,0
01.ABQ.006.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	0,0	Layanan	Infinity	5.250,0	0,0	0,0	0,0	11.550,0	12.705,0	13.975,5
01.ABQ.007	Kebijakan Bidang Aparatur	1	Rekomendasi Kebijakan		278.447,0	1	1	1	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.ABQ.007.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	15.000,0	15.000,0	1,0	1,0	1,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.ABQ.007.052	Pelaksanaan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	263.447,0	263.447,0	1,0	1,0	1,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
01.ABQ.007.053	Monev dan Pelaporan	1,0	Layanan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar		173.295,0				574.972,0	689.967,0	862.460,0
01.AFA.001	Standar Teknis Jabatan	1	Rancangan Standar		173.295,0	1	1	1	574.972,0	689.967,0	862.460,0
01.AFA.001.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	4.500,0	4.500,0	1,0	1,0	1,0	15.525,0	18.630,0	23.288,0
01.AFA.001.052	Pelaksanaan	2,0	NSPK	82.147,5	164.295,0	1,0	1,0	1,0	226.882,0	272.259,0	340.324,0
01.AFA.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	Layanan	4.500,0	4.500,0	1,0	1,0	1,0	332.565,0	399.078,0	498.848,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga/ Unit Kerja/ Tim		1.072.520,0				7.072.361,0	8.078.835,1	9.480.844,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Atas Nilai Indeks Profesionalitas ASN	40	Lembaga		375.225,0	625	625	625	643.687,0	772.425,0	965.531,0
01.BDB.001.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	4.500,0	4.500,0	1,0	1,0	1,0	10.350,0	12.420,0	15.525,0
01.BDB.001.052	Pelaksanaan	40,0	Lembaga	4.105,6	164.225,0	625,0	625,0	625,0	187.137,0	224.565,0	280.706,0
01.BDB.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	Layanan	206.500,0	206.500,0	1,0	1,0	1,0	446.200,0	535.440,0	669.300,0
01.BDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Kebutuhan ASN	624	Lembaga		445.815,0	300	300	300	880.000,0	968.000,1	1.064.800,0
01.BDB.002.051	Perencanaan dan Persiapan	0,0	Layanan	Infinity	2.625,0	0,0	0,0	0,0	8.662,5	9.528,8	10.481,6
01.BDB.002.052	Pelaksanaan	0,0	Lembaga	Infinity	437.940,0	0,0	0,0	0,0	862.675,0	948.942,5	1.043.836,8
01.BDB.002.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	0,0	Layanan	Infinity	5.250,0	0,0	0,0	0,0	8.662,5	9.528,8	10.481,6
01.BDB.004	Pembinaan di Bidang Kebijakan Kompensasi ASN	0	Lembaga		0,0	0	0	0	2.225.000,0	2.350.000,0	2.465.000,0
01.BDB.004.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	500.000,0	520.000,0	530.000,0
01.BDB.004.052	Pelaksanaan	309,0	Lembaga	0,0	0,0	320,0	325,0	330,0	1.400.000,0	1.500.000,0	1.600.000,0
01.BDB.004.053	Monev/Pelaporan	1,0	Layanan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	325.000,0	330.000,0	335.000,0
01.BDB.005	Penyusunan Rencana Pengembangan Karir Instansi Pemerintah	20	Lembaga		251.480,0	137	137	137	3.323.674,0	3.988.410,0	4.985.513,0
01.BDB.005.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	16.250,0	16.250,0	1,0	1,0	1,0	35.995,0	43.194,0	53.993,0
01.BDB.005.052	Pelaksanaan	20,0	Lembaga	669,8	13.395,0	137,0	137,0	137,0	2.281.357,0	2.737.629,0	3.422.036,0
01.BDB.005.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	Layanan	221.835,0	221.835,0	1,0	1,0	1,0	1.006.322,0	1.207.587,0	1.509.484,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga/ Unit Kerja/ Tim		3.000.000,0				0,0	0,0	0,0
01.QDB.003	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di Seluruh K/L/D	411	Lembaga		3.000.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.QDB.003.051	Perencanaan dan Persiapan	0,0	Layanan	Infinity	551.792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QDB.003.052	Pelaksanaan	0,0	Lembaga	Infinity	1.869.989,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QDB.003.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	0,0	Layanan	Infinity	578.219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Terwujudnya pembinaan manajemen ASN				2.822.258,0				797.258,0	797.258,0	372.258,0
02.AEA	Koordinasi		kegiatan		2.450.000,0				0,0	0,0	0,0
02.AEA.001	Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian	1	kegiatan		2.450.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.001.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	109.750,0	109.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.001.052	Pelaksanaan	1,0	Kegiatan	2.340.250,0	2.340.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga/ Unit Kerja/ Tim		372.258,0				797.258,0	797.258,0	372.258,0
02.BDB.003	Pembinaan Manajemen Kepegawaian di bidang Kompensasi	25	Lembaga		372.258,0	25	25	25	797.258,0	797.258,0	372.258,0
02.BDB.003.051	Perencanaan dan Persiapan	0,0	Layanan	Infinity	3.750,0	0,0	0,0	0,0	28.750,0	28.750,0	3.750,0
02.BDB.003.052	Pelaksanaan	0,0	Lembaga	Infinity	368.508,0	0,0	0,0	0,0	718.508,0	718.508,0	368.508,0
02.BDB.003.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	0,0	Layanan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	50.000,0	0,0
Total					8.825.000,0	-	-	-	11.379.591,0	12.846.560,1	14.247.012,1

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Tersusunnya rumusan kebijakan teknis manajemen ASN		6.002.742,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.002.742,0
01.AAH	Peraturan lainnya		825.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	825.000,0
01.AAH.001	Peraturan di Bidang Kepegawaian		825.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	825.000,0
01.AAH.001.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	16.875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.875,0
01.AAH.001.052	Pelaksanaan	Utama	321.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321.100,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AAH.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	487.025,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487.025,0
01.ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur		931.927,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	931.927,0
01.ABQ.001	Rekomendasi Kebijakan Gaji, Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan ASN		299.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299.295,0
01.ABQ.001.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	11.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.250,0
01.ABQ.001.052	Pelaksanaan	Utama	288.045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288.045,0
01.ABQ.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABQ.002	Rekomendasi Kebijakan Tunjangan, Fasilitas dan Evaluasi Jabatan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABQ.002.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABQ.002.052	Pelaksanaan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABQ.002.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABQ.004	Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan ASN		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.ABQ.004.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	14.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.000,0
01.ABQ.004.052	Pelaksanaan	Utama	139.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139.770,0
01.ABQ.004.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	46.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.230,0
01.ABQ.005	Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN		68.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68.250,0
01.ABQ.005.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABQ.005.052	Pelaksanaan	Pendukung	2.625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.625,0
01.ABQ.005.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	65.625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.625,0
01.ABQ.006	Rekomendasi Perencanaan Kebutuhan ASN		85.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85.935,0
01.ABQ.006.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	5.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.250,0
01.ABQ.006.052	Pelaksanaan	Utama	75.435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.435,0
01.ABQ.006.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	5.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.250,0
01.ABQ.007	Kebijakan Bidang Aparatur		278.447,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	278.447,0
01.ABQ.007.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
01.ABQ.007.052	Pelaksanaan	Utama	263.447,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263.447,0
01.ABQ.007.053	Monev dan Pelaporan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		173.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173.295,0
01.AFA.001	Standar Teknis Jabatan		173.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173.295,0
01.AFA.001.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AFA.001.052	Pelaksanaan	Utama	164.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164.295,0
01.AFA.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1.072.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.072.520,0
01.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Atas Nilai Indeks Profesionalitas ASN		375.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375.225,0
01.BDB.001.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0
01.BDB.001.052	Pelaksanaan	Utama	164.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164.225,0
01.BDB.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	206.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206.500,0
01.BDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Kebutuhan ASN		445.815,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445.815,0
01.BDB.002.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	2.625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.625,0
01.BDB.002.052	Pelaksanaan	Utama	437.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437.940,0
01.BDB.002.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	5.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.250,0
01.BDB.004	Pembinaan di Bidang Kebijakan Kompensasi ASN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.004.051	Perencanaan dan Persiapan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.004.052	Pelaksanaan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.004.053	Monev/Pelaporan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB.005	Penyusunan Rencana Pengembangan Karir Instansi Pemerintah		251.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251.480,0
01.BDB.005.051	Perencanaan dan Persiapan	Pendukung	16.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.250,0
01.BDB.005.052	Pelaksanaan	Utama	13.395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.395,0
01.BDB.005.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Pendukung	221.835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221.835,0
01.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0
01.QDB.003	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di Seluruh K/L/D		3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0
01.QDB.003.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	551.792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	551.792,0
01.QDB.003.052	Pelaksanaan	Utama	1.869.989,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.869.989,0
01.QDB.003.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	578.219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	578.219,0
02	Terwujudnya pembinaan manajemen ASN		2.822.258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.822.258,0
02.AEA	Koordinasi		2.450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.450.000,0
02.AEA.001	Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian		2.450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.450.000,0
02.AEA.001.051	Perencanaan dan Persiapan	Pendukung	109.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109.750,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.AEA.001.052	Pelaksanaan	Utama	2.340.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.340.250,0
02.AEA.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		372.258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372.258,0
02.BDB.003	Pembinaan Manajemen Kepegawaian di bidang Kompensasi		372.258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372.258,0
02.BDB.003.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.750,0
02.BDB.003.052	Pelaksanaan	Utama	368.508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368.508,0
02.BDB.003.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			8.825.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.825.000,0

Jakarta, 09 Februari 2023

RENCANA TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEDEPUTIAN PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target	SATUAN	Target							
						TW1	TW2	SM1	TW3	s.d TW3	TW4	SM2	Tahunan
STAKEHOLDER PERSPECTIVE													
1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	1	Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	100	persentase (Posisi Akhir)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	100%	100%
CUSTOMER PERSPECTIVE													
2	Terwujudnya Pembinaan Kepegawaian yang berkualitas Prima.	2	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan BKN	93	nilai (Posisi Akhir)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93	93	93
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE													
3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	3	Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN	100	Persentase (Akumulasi)	20%	27%	47%	33%	80%	20%	53%	100%
4	Tersusunnya Rencana Pengembangan Karir PNS Instansi Pemerintah	4	Jumlah instansi pemerintah yang menyusun Rencana Pengembangan Karir PNS	20	Jumlah (Posisi Akhir)	5	5	10	5	15	5	20	20
5	Implementasi Kebijakan Manajemen Kompensasi pada Instansi	5	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan kebijakan kompensasi ASN	85	Persentase (Nilai Posisi Akhir)	80%	81%	83%	83%	83%	85%	85%	85%
6	Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja ASN pada Instansi	6	Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Sistem Manajemen Kinerja ASN dengan Kriteria Minimal Baik	85	persentase (posisi akhir)	51%	34%	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%
7	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Kedeputian PMK	7	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Kedeputian PMK	4	Jumlah dokumen (Posisi Akhir)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	4
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE													
8	Terwujudnya ASN BKN yang profesional di lingkup Kedeputian PMK	8	Indeks Profesionalitas ASN Kedeputian PMK BKN	80	nilai (Posisi Akhir)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	80	80
9	Tersedianya Sistem Informasi ASN yang Andal dan mudah diakses	9	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100	persentase (Posisi Akhir)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
10	Terwujudnya Birokrasi di lingkup Kedeputian PMK BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan prima	10	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kedeputian PMK	35	nilai (Posisi Akhir)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	35
		11	Skor atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Kedeputian PMK BKN	78	nilai (Posisi Akhir)	N/A	78	78	N/A	78	N/A	N/A	78
11	Terkelolanya anggaran Kedeputian PMK secara efisien dan akuntabel.	12	Persentase kualitas pelaksanaan kualitas anggaran BKN Kedeputian PMK	96.25	Persentase (posisi akhir)	16%	36%	36%	61%	61%	96.25%	96.25%	96.25%
		13	Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/inspektorat	100	persentase (Posisi Akhir)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%

Jakarta, Januari 2023

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian

Haryomo Dwi Putranto

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:6904-2010-2500-8601

Kementerian Negara/Lembaga : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : (01) Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**017220**	**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	28.129.258	42.208.408	37.443.990	34.467.674	29.562.296	30.371.817	30.403.232	30.237.335	31.545.847	28.627.272	34.610.960	32.277.867	389.885.956
		BELANJA PEGAWAI	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.388	261.459.204
		BELANJA BARANG	6.062.342	7.331.515	9.651.328	6.720.078	7.238.713	7.493.829	7.706.352	7.364.901	8.733.507	6.594.626	12.578.314	10.245.080	97.720.586
		BELANJA MODAL	278.659	13.088.637	6.004.407	5.959.340	535.327	1.089.732	908.624	1.084.178	1.024.084	244.390	244.390	244.399	30.706.166
	088.01.CO.3644	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian	58.021	68.743	58.021	68.743	68.743	80.538	80.538	68.743	58.021	68.743	68.743	77.403	825.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	58.021	68.743	58.021	68.743	68.743	80.538	80.538	68.743	58.021	68.743	68.743	77.403	825.000
	088.01.CO.3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	558.917	594.417	737.645	702.879	669.315	713.462	556.917	556.917	556.917	556.917	556.917	557.233	7.318.454
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	529.031	564.531	707.759	672.993	639.429	683.576	527.031	527.031	527.031	527.031	527.031	527.338	6.959.813
		53 BELANJA MODAL	29.886	29.886	29.886	29.886	29.886	29.886	29.886	29.886	29.886	29.886	29.886	29.895	358.641
	088.01.CO.3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	0	112.888	436.620	140.000	300.000	897.060	1.183.192	1.655.000	2.720.240	240.000	200.478	0	7.885.478
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	108.674	425.403	131.572	278.930	877.229	1.056.775	1.275.749	1.940.668	240.000	200.478	0	6.535.478
		53 BELANJA MODAL	0	4.214	11.217	8.428	21.070	19.831	126.417	379.251	779.572	0	0	0	1.350.000
	088.01.CO.4845	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN	393.305	744.913	1.110.449	742.124	802.460	708.880	592.083	1.090.219	683.035	546.940	574.861	835.733	8.825.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	393.305	744.913	1.110.449	742.124	802.460	708.880	592.083	1.090.219	683.035	546.940	574.861	835.733	8.825.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:6904-2010-2500-8601

Kementerian Negara/Lembaga : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : (01) Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	088.01.CO.4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	1.587	61.154	402.807	233.079	121.461	440.191	227.338	107.530	395.130	379.038	99.048	106.637	2.575.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.587	61.154	402.807	233.079	121.461	440.191	227.338	107.530	395.130	379.038	99.048	106.637	2.575.000
	088.01.CO.4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN	22.542	143.763	955.225	802.766	466.236	194.479	1.060.720	139.602	572.118	378.118	433.297	281.134	5.450.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	22.542	143.763	772.929	700.225	466.236	194.479	1.003.753	139.602	515.150	321.150	376.329	224.167	4.880.325
		53 BELANJA MODAL	0	0	182.296	102.542	0	0	56.968	0	56.968	56.968	56.968	56.968	569.675
	088.01.CO.4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	355.653	385.794	528.903	282.920	370.738	491.842	415.613	307.023	567.204	224.464	228.850	265.995	4.425.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	352.995	361.431	515.429	271.219	359.037	480.141	403.912	295.321	567.204	224.464	228.850	265.995	4.326.000
		53 BELANJA MODAL	2.658	24.363	13.473	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701	0	0	0	0	99.000
	088.01.WA.3630	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	87.266	87.650	114.440	221.109	163.510	119.224	259.800	170.500	158.950	148.600	138.340	34.535	1.703.924
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	87.266	87.650	114.440	221.109	163.510	119.224	259.800	170.500	158.950	148.600	138.340	34.535	1.703.924
	088.01.WA.3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	5.150	13.900	66.550	148.350	116.350	28.200	46.750	43.700	74.801	126.730	94.694	48.009	813.184
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.150	13.900	66.550	148.350	116.350	28.200	46.750	43.700	74.801	126.730	94.694	48.009	813.184
	088.01.WA.3639	Pelaksanaan Tugas Khusus (Spesial Mission)	0	88.120	110.370	123.100	83.500	71.570	101.566	59.500	70.050	40.500	37.683	64.041	850.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	88.120	110.370	123.100	83.500	71.570	101.566	59.500	70.050	40.500	37.683	64.041	850.000
	088.01.WA.3648	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi	0	7.982.322	525.572	427.184	1.243.497	797.517	376.204	361.237	461.197	843.554	341.197	678.021	14.037.500

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:6904-2010-2500-8601

Kementerian Negara/Lembaga : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : (01) Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	302.822	475.822	392.184	1.243.497	797.517	376.204	361.237	461.197	843.554	341.197	678.021	6.273.250
		53 BELANJA MODAL	0	7.679.500	49.750	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.764.250
	088.01.WA.3662	Pengkajian dan Penelitian di Bidang Manajemen ASN	0	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	20.900	0	200.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	20.900	0	200.000
	088.01.WA.4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM	20.573	123.906	183.906	183.906	362.567	457.240	409.268	678.545	690.573	560.573	819.913	562.484	5.053.454
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	20.573	123.906	183.906	183.906	362.567	457.240	409.268	678.545	690.573	560.573	819.913	562.484	5.053.454
	088.01.WA.4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	26.626.244	31.761.870	32.113.913	30.292.793	24.693.598	25.271.395	24.985.248	24.889.814	24.459.223	24.433.888	30.937.380	28.707.765	329.173.131
		51 BELANJA PEGAWAI	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.256	21.788.388	261.459.204
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	4.591.873	4.622.940	4.607.873	2.732.753	2.432.672	2.454.825	2.513.340	2.438.219	2.513.309	2.488.095	8.991.588	6.761.840	47.149.327
		53 BELANJA MODAL	246.115	5.350.674	5.717.784	5.771.784	472.670	1.028.314	683.652	663.339	157.658	157.536	157.536	157.536	20.564.600
	088.01.WA.4844	Legislasi dan Litigasi	0	19.068	79.670	78.820	80.420	80.320	88.094	89.106	58.489	59.308	58.658	58.877	750.831
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	19.068	79.670	78.820	80.420	80.320	88.094	89.106	58.489	59.308	58.658	58.877	750.831
		PERKIRAAN PENERIMAAN	185.400	408.344	221.798	190.300	5.323.648	2.641.270	513.376	455.798	487.148	440.453	623.416	515.249	12.006.200
		- PNBP (425131)	0	78.634	0	0	0	0	0	0	0	0	196.150	403.451	678.235
		- PNBP (425429)	50.400	50.800	110.000	100.300	5.121.850	2.269.550	40.400	30.000	30.350	25.000	25.000	0	7.853.650
		- PNBP (425429)	135.000	278.910	111.798	90.000	201.798	371.720	472.976	425.798	456.798	415.453	402.266	111.798	3.474.315

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Sekretaris Utama

ttd.

Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP
NIP 196605091986032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2023
IV A. B L O K I R

DS:6904-2010-2500-8601

Kementerian Negara/Lembaga : [088] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : [01] Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [017220] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
017220	**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	42.586.147
	51 BELANJA PEGAWAI	Rp.	29.582.602
	52 Belanja Barang	Rp.	10.814.091
	53 Belanja Modal	Rp.	2.189.454
088.01.CO	**Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN**		
3644	**Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian**		
3644.FAC	**Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	156.750
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
3655	**Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi**		
3655.AFA	**Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria**		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	120.000
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
3663	**Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN**		
3663.UAC	**Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	175.455
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	129.200
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	400.000
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522141 Belanja Sewa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	75.000
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	270.345
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	536111 Belanja Modal Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	450.000
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4845	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN**		
4845.AAH	**Peraturan lainnya**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	28.852
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.650
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.700
	Automatic Adjustment		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2023
IV A. B L O K I R

DS:6904-2010-2500-8601

Kementerian Negara/Lembaga : [088] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : [01] Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [017220] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	122.548
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4845.ABQ	**Kebijakan Bidang Aparatur**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	36.900
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	12.400
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	21.555
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.500
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	89.145
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4845.AEA	**Koordinasi**		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	462.890
	automatic adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4845.AFA	**Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	33.210
	automatic adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.650
	automatic adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.000
	automatic adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4845.BDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	50.475
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	10.000
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	69.395
	automatic adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2023
IV A. B L O K I R

DS:6904-2010-2500-8601

Kementerian Negara/Lembaga : [088] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : [01] Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [017220] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	29.880
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4845.QDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	266.066
	automatic adjusment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	22.850
	automatic adjusment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	45.000
	automatic adjusment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	457.677
	Automatic Adjusment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	708.407
	automatic adjusment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4846	**Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN**		
4846.AEA	**Koordinasi**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	105.877
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	7.500
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	12.000
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	89.776
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	185.356
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4846.BAB	**Pelayanan Publik kepada lembaga**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.025
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	32.400
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	20.316
	Automatic Adjustment		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2023
IV A. B L O K I R

DS:6904-2010-2500-8601

Kementerian Negara/Lembaga : [088] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : [01] Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [017220] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4847	**Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN**		
4847.BMA	**Data dan Informasi Publik**		
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	99.000
	automatic adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	6.000
	automatic adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4847.FAA	**Kearsipan**		
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	180.500
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4847.FAB	**Sistem Informasi Pemerintahan**		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	120.000
	Automatic Adjusment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4848	**Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN**		
4848.BDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	77.200
	Sesuai ND 435/PR.04/ND/A/2022		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	20.023
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4848.BIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	22.136
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.750
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	150.000
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	223.270
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	97.485
	Sesuai ND 435/PR.04/ND/A/2022		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	24.636
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
088.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2023
IV A. B L O K I R

DS:6904-2010-2500-8601

Kementerian Negara/Lembaga : [088] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : [01] Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [017220] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
3630	**Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik**		
3630.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**		
521211	Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	69.375
	Automatic Adjustment		
Disposisi:	Automatic Adjustment		
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.600
	Automatic Adjustment		
Disposisi:	Automatic Adjustment		
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	9.700
	Automatic Adjustment		
Disposisi:	Automatic Adjustment		
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	15.000
	Automatic Adjustment		
Disposisi:	Automatic Adjustment		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	151.028
	https://sakti.kemenkeu.go.id/33cxpSXbmWMSlvE9RhxVJuY02hgb9B1CMM537eC9nag		
Disposisi:	Automatic Adjustment		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	27.500
	https://sakti.kemenkeu.go.id/33cxpSXbmWMSlvE9RhxVJuY02hgb9B1CMM537eC9nag		
Disposisi:	Automatic Adjustment		
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	50.000
	Automatic Adjustment		
Disposisi:	Automatic Adjustment		
3635	**Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal**		
3635.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**		
521211	Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	99.012
	Automatic Adjustment		
Disposisi:	Automatic Adjustment		
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	5.125
	Adjustment		
Disposisi:	Automatic Adjustment		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	58.500
	Adjustment		
Disposisi:	Automatic Adjustment		
3639	**Pelaksanaan Tugas Khusus (Spesial Mission)**		
3639.BCE	**Penanganan Perkara**		
521211	Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	4.976
	Automatic Adjustment		
Disposisi:	Automatic Adjustment		
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	6.000
	Automatic Adjustment		
Disposisi:	Automatic Adjustment		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	150.524
	Automatic Adjustment		
Disposisi:	Automatic Adjustment		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2023
IV A. B L O K I R

DS:6904-2010-2500-8601

Kementerian Negara/Lembaga : [088] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : [01] Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [017220] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
3648	**Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi**		
3648.CAN	**Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**		
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	44.750
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
3648.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	21.150
	Automatic Adjusment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	200.400
	Automatic Adjusment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
3662	**Pengkajian dan Penelitian di Bidang Manajemen ASN**		
3662.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**		
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	14.500
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4842	**Pengelolaan Organisasi dan SDM**		
4842.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	60.000
	automatic adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4842.EBC	**Layanan Manajemen SDM Internal**		
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	180.000
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	25.000
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	780.521
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4842.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	40.000
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4843	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum**		
4843.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**		
	512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	29.582.602
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522141 Belanja Sewa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.856.000
	Pemblokiran menunggu Revisi RKBMN		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
4843.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**		
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2023
IV A. B L O K I R

DS:6904-2010-2500-8601

Kementerian Negara/Lembaga : [088] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : [01] Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [017220] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.694.704
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4843.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	50.525
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	107.900
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	48.000
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	356.805
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
4844	**Legislasi dan Litigasi**		
4844.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	15.150
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.050
	Automatic Adjustment		

KODE	URAIAN		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	8.800
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	112.400
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	4.800
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Sekretaris Utama

ttd.
Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP
NIP 196605091986032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 088.01.1.017220/2023
IV B. C A T A T A N

DS:6904-2010-2500-8601

Kementerian Negara/Lembaga : [088] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : [01] Badan Kepegawaian Negara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [017220] BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Sekretaris Utama

ttd.
Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP
NIP 196605091986032001